

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., & Achmad, R. (1983). *Intisari Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Gunadi, I., & Effendi, J. (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Hakim, L. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Deepublish Publisher.
- Hamzah, A. (2007). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Cetakan ke-3). Rinneka Cipta.
- Marzuki, P. M. (2021). *Peneitian Hukum* (Cetakan ke 15). Kencana.
- Moeljatno. (1983). *Hukum Pidana Indonesia*. Bina Aksara.
- Kemdikbud RI. (2011). *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami Untuk Membasmi Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*.
- Nasir, M. R. (2006). *Dialektika islam dengan problem kontemporer*. IAIN Press.
- Prasetyo, T. (2013). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Purwoleksono, D. E. (2014). *Hukum Pidana*. Airlangga University Press.
- Soerjono, S. (1982). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum* (Cetakan ke-1). Rajagrafindo Persada.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (1st ed.). PT Nusantara Persada Utama.

- Muhaimin, M. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mullaney, T. S., & Rea, C. (2022). *Where Research Begins: Choosing a Research Project That Matters to You (and the World)*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Salim, S., & Syahrums, S. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Kegamaan, dan Pendidikan* (5th ed.; H. Haidir, ed.). Bandung: Citapustaka Media.
- Sonata, D. L. (2015). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15–35. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Subardjo, S. (2014). *Petunjuk Praktis Penelitian dan Penulisan Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Cetta Media.
- Ali, Mahrus. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Djamali, R. A. (2010). *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Hamzah, Andi. (2005). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Yarsif Watampone: Jakarta.
- Hardjana, Agus M. (2004). *Landasan Etika Profesi*. Cet 5: Jakarta.
- Irfan, M. Nurul. (2011). *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Ismatullah, Dedi. (2011). *Etika Profesi Hukum*. Cv Pustaka Setia: Bandung.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. (2011), *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.

- Rubai, Masruchin. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana*. UM press dan FH UB, Malang.
- Sjahdeini, S. R. (2007). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Grafiti Medika Pers, Jakarta.
- Supriadi. (2006). *Etika dan Tanggung Jawab di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Wirjono, Prodjodikoro. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),
- Candra, C., Simbolon, E. T., Moekri, S. Y., Novia, V., & Karo-Karo, R. (2022). Korelasi Pemidanaan Dalam Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI Terhadap Sanksi Etik Profesi Jaksa (Studi kasus: Pinangki Sirna Malasari). *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 21.
- Deshaini, L., & Rusmini. (2018). *Memahami Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 04 P.KPK Tahun 2006 Tentang Kode Etik Pegawai Pimpinan KPK*.
- Latala, M. R. A., Manoppo, B., & Koesomo, A. T. (2021). Analisis Terhadap Operasi Tangkap Tangan Yang Di Lakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, X.
- Muslih, M. (2013). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch. *Legalitas Edisi Juni 2013*, IV.
- Redjeki, D. P. S., & Herdiyansyah, J. (2013). Memahami Sebuah Konsep Integritas . *STIE Semarang*, 5.
- Sandi, A., Wijayanti, A., Arafah, G. H. I., Milati, S. K., & Bifadillah, P. (2022). Bentuk Pelanggaran Kode Etik Serta Sanksi Pelanggaran Kode Etik Hakim Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Islamic Studies Review*, 2.
- Sinaga, N. A. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*.

- Soemarno, M. (2007). Negara Hukum Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37.
- Mahrus Ali, (2015), Dasar-Dasar Hukum Pidana , *Sinar Grafika*, Jakarta.
- Anggara, Bayu. (2022) Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
- Nurdiana et al, Eksistensi Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Era Malpraktik Profesi Hukum 2023 *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* Vol 14 No 02
- kandar, Octo & Dharmawan, Dzaky Perdana. 2022. Analisis Kewenangan Diskresi Pejabat Daerah Perihal Pengalihan Anggaran. *Krtha Bhayangkara*, Vol 16 No 2
- Evi hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Dita Risnia, (2017). Analisis Penerapan Sanksi Tindak Pidana Korupsi Terhadap Badan Hukum Leasing Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Wall Et al 2021 vol 1 no 9
- Hilinder, R. D. (2017). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Kesusilaan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No.4 Tahun 2008 tentang Pornografi* [Thesis]. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Simatupang, F. I. (2022). *Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .

Suharto, Frento. T. (2021). *Legalitas Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan Dalam Perspektif Criminal Justice System* [Thesis]. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Aini, Atika Rahmatatil. (2019). Tindak Pidana Melalui Etika Profesi Dalam Menegakan Hukum Terhadap Terjadinya Pelanggaran Kode Etik (Studi Kasus Profesi Kepolisian Dalam Mengamankan Unjuk Rasa Di Kantor Dpr September 2019). Ilmu Hukum Universitas Islam Sunan Gunung Djati. <https://etheses.uinsgd.ac.id/28398/1/TINDAK%20PIDANA%20MELALUI%20%20ETIKA%20PROFESI%20DALAM%20MENEGAKAN%20HUKUM%20TERHADAP%20TERJADINYA%20PELANGGARAN%20KODE%20ETIK.pdf>

Pratiwi, Diah Reski. (2022). Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Negara Yang Menyalahi Standar Operational Prosedur Tembak Di Tempat, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1806/2022%20DIAH%20RESKI%20PRATIWI%204517060145.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No 19 Tahun 2019 perubahan kedua Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 2 Tahun 2020 Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Dewan Pengawas, Pimpinan, Dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang No 7 tahun 2020 tentang oraganisa dan tatakerja Komisi Pemberantasan Korupsi